

## ABTRAK

Banjir yang terjadi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara bukan merupakan banjir yang pertama kali terjadi. Namun, hampir setiap tahunnya selalu terjadi banjir di Kecamatan Lhoksukon dengan tinggi air mencapai antara 1,5-2 meter yang mana banjir ini sangat merugikan masyarakat. Masalah pada penelitian ini meliputi Upaya Pemerintah Aceh Utara dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon pada tahun 2020 dan faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon pada tahun 2020. Metodologi penelitian dengan cara ekologi politik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon dengan cara melakukan pengerukan di sepanjang sungai keuruto dan memperbaiki tanggul sungai yang rusak. Hambatan pemerintah Aceh Utara dalam menanggulangi banjir yakni kurangnya anggaran dana dalam pembangunan tanggul dan kurangnya keahlian personil dalam melakukan evakuasi banjir.

**Kata kunci:** Ekologi politik, Pemerintah, Banjir.

## **ABSTRACT**

The flood that occurred in Lhoksukon sub-district, North Aceh district, was not the first flood that occurred. However, almost every year there is always a flood in Lhoksukon sub-district with water levels reaching between 1.5-2 meters which is very detrimental to the community. The problems in this study include the efforts of the North Aceh government in tackling flood disasters in the Lhoksukon sub-district in 2020 and the inhibiting factors for the North Aceh district government in tackling the flood disaster in the Lhoksukon sub-district in 2020. research methodology by means of political ecology. The results of this study are the efforts of the North Aceh district government in tackling the flood disaster in Lhoksukon sub-district by dredging along the Keuruto river and repairing damaged river embankments. The obstacles for the North Aceh government in tackling floods are the lack of budget funds for the construction of embankments and the lack of personnel expertise in carrying out flood evacuations.

**Keywords:** Political ecology, Government, Flood.